

**STUDI DESKRIPTIF PENERAPAN PROGRAM NAWACITA PRESIDEN  
JOKO WIDODO TENTANG MEMBANGUN INDONESIA DARI  
PINGGIRAN TERHADAP KESEJAHTERAAN WARGA DI  
DESA KANOMAN KECAMATAN PANJATAN  
KABUPATEN KULON PROGO**

Oleh : Fitri Halimah

**A. Program Nawacita Presiden Joko Widodo**

Nawacita adalah istilah umum yang diambil dari bahasa sansekerta *nawa* artinya sembilan dan *cita* artinya harapan, keinginan, impian. Nawacita yaitu sembilan harapan, keinginan, impian dari Bapak Joko Widodo untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Bapak Joko Widodo menggunakan istilah Nawacita ini untuk keperluan politik saat beliau mencalonkan diri sebagai Presiden dan Bapak Jusuf Kalla sebagai calon Wakil Presiden pada Pemilihan Umum tahun 2014. Nawacita digunakan sebagai visi-misi beliau apabila terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu tahun 2014-2019. Visi-misi Bapak Joko Widodo dan Bapak Jusuf Kalla berisi sembilan pokok agenda prioritas untuk melanjutkan semangat perjuangan dari Soekarno yang dikenal sebagai Trisakti yaitu berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Program Nawacita Bapak Joko Widodo dan Bapak Jusuf Kalla meliputi melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, membangun Indonesia dari

pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan, menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia diwujudkan dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kerja masyarakat Indonesia, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor sektor strategis ekonomi domestik, melakukan revolusi karakter bangsa diwujudkan melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan (civic education), dan memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Bapak Joko Widodo dan Bapak Jusuf Kalla setelah terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden menerapkan Nawacita kedalam program-program pemerintahannya melalui sebuah kabinet yang disebut Kabinet Kerja. Struktur Kabinet Kerja disusun untuk mengendalikan agenda-agenda yang sudah terancang dalam Nawacita. Merubah posisi dan menambah jumlah menteri koordinator pun dilakukan oleh Bapak Joko Widodo. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dibentuk untuk pembangunan dan menegakkan kedaulatan Indonesia dibidang kemaritiman hal ini dilakukan karena Indonesia adalah negara maritim. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan dibentuk untuk mengkoordinir pembangunan karakter berlandaskan budaya bangsa sesuai dengan agenda Nawacita. Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah dipisahkan dari bidang pendidikan tinggi yang sebelumnya merupakan satu

kesatuan agar pembangunan karakter dan budaya bangsa melalui pendidikan dasar ditangani secara lebih serius dengan semangat Nawacita. Kementerian pariwisata dipisahkan dari bidang ekonomi kreatif agar bidang tersebut dikelola secara lebih serius dan dapat menjadi salah satu andalan Indonesia untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan dapat menguasai pasar untuk meningkatkan pendapatan ekonomi.

Mayoritas warga Desa Kanoman bekerja sebagai petani, dengan adanya Program Nawacita Presiden Joko Widodo warga Desa Kanoman merasa kesejahteraannya meningkat. Hal ini karena dengan adanya Program Nawacita tingkat pembangunan di Desa Kanoman berkembang pesat. Pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Kanoman antara lain pembangunan rumah tidak layak huni, perpustakaan desa, corbok, talut, blok plat (gorong-gorong), saluran irigasi, perkerasan jalan (pengaspalan jalan desa), jambanisasi, lantainisasi dan pembangunan lainnya. Dengan adanya saluran irigasi yang memadai menjadikan air yang mengalir ke sawah-sawah tercukupi, ini menjadikan petani dapat menanam bahan pangan tanpa kesulitan dalam mencari air saat tidak musim penghujan. Petani tidak akan takut gagal panen apabila ketersediaan air memadai. Hasil pertanian di Desa Kanoman antara lain: padi, cabai, jagung, kedelai, melon, semangka dan sayur-sayuran. Selain itu dengan adanya jalan yang bagus maka mobilitas dan akses usaha bagi warga Desa Kanoman akan lebih mudah.

Pembangunan infrastruktur apabila tidak diimbangi dengan sumber daya manusianya juga tidak akan berjalan baik, maka Pemerintah Desa Kanoman juga berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Pemerintah

Desa Kanoman memberikan berbagai pelatihan dan pembinaan untuk warga Desa Kanoman, antara lain: pelatihan kesehatan sistem deteksi dini dan tumbuh kembang balita, pelatihan membuat, penyuluhan kesehatan, pelatihan dan pembinaan kesehatan jiwa masyarakat, kerukunan umat beragama (guru mengaji, rois, santunan orang cacat), pelatihan pemanfaatan tanaman obat, pelatihan pembudidayaan sapi pedaging, dll. Dengan adanya berbagai macam pelatihan yang telah diberikan oleh Pemerintah Desa Kanoman kepada warga masyarakat Desa Kanoman kesejahteraan warga masyarakat meningkat, hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah warga masyarakat yang tergolong miskin mengalami penurunan.

## **B. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Desa**

Presiden Jokowi berjanji untuk menghadirkan pembangunan dikawasan-kawasan terdepan Indonesia. Kesejahteraan harus dihadirkan disemua kawasan, tak terkecuali dimasyarakat pinggiran atau desa. Sejak dari awal Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah mencanangkan Program Nawacita yakni sembilan agenda prioritas untuk Indonesia. Nawacita akan digarap Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam menjalankan roda pemerintahannya dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Pembangunan daerah pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan merupakan poin ketiga dari Nawacita. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan maksudnya bahwa pembangunan tidak lagi berpusat (sentralisasi) diperkotaan melainkan harus menyebar diseluruh pelosok (desentralisasi). Daerah

satu dengan daerah yang lainnya tak harus sama persis dalam melaksanakan pembangunan. Perbedaan pembangunan justru diharapkan agar dapat mengakomodir karakteristik dan kemampuan setiap wilayah. Istilahnya adalah desentralisasi asimetris tetapi meskipun begitu otonomi tetap harus dijaga agar tetap sinergis.

Kebijakan desentralisasi asimetris dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia dikawasan-kawasan tertentu, memperkuat daya saing ekonomi Indonesia secara global, dan untuk membantu daerah-daerah yang kapasitas berpemerintahan belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan, meletakkan dasar-dasar bagi dimulainya desentralisasi asimetris. Kebijakan desentralisasi asimetris ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia di kawasan-kawasan perbatasan, memperkuat daya saing ekonomi Indonesia secara global, dan untuk membantu daerah-daerah yang kapasitas berpemerintahan belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik. Mensinergikan tata kelola pemerintahan Indonesia sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terfragmentasi sebagaimana berkembang selama ini.

Menyelesaikan problem fragmentasi dalam penyelenggaraan politik desentralisasi di pusat dengan memperlakukan regim desentralisasi sebagai ujung tombak pengelolaan pemerintahan negara menggantikan dominasi regim sektoral dan keuangan dalam tata-pengolaan pemerintahan negara selama ini. Reformasi dalam tata hubungan keuangan pusat dan daerah dengan cara pengaturan kembali

sistem distribusi keuangan nasional sehingga proses pembangunan tidak semata-mata mengikuti logika struktur pemerintahan, tetapi melihat kondisi dan kebutuhan daerah yang asimetris. Berkomitmen melakukan pemerataan pembangunan antar wilayah: antara Jawa dengan luar Jawa, antara wilayah Indonesia Barat dengan wilayah Timur Indonesia, antara Kota dengan Desa.

Menata kembali pembentukan daerah otonom baru yang lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dengan perubahan kebijakan dana alokasi umum (DAU) yang menjadi salah satu sebab yang mendorong pembentukan daerah otonom baru dan mengharuskan adanya pentahapan bagi pembentukan daerah otonom baru. Mendorong daerah untuk dapat melakukan pengurangan overhead cost (biaya rutin) dan mengalokasikan lebih banyak untuk pelayanan publik. Melakukan reformasi pelayanan publik melalui: penguatan desa, kelurahan dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik serta mengawal implementasi Undang-Undang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan.

Meningkatkan kapasitas pemerintah nasional untuk lebih menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dan pelayanan, bagi daerah otonom secara lebih maksimal dan mendorong kemungkinan bagi adanya penggabungan ataupun penghapusan daerah otonom setelah melalui proses pembinaan, monitoring dan evaluasi yang terukur dalam jangka waktu yang memadai. Pembangunan dari desa ini dimulai dengan peningkatan jumlah pendapatan setiap desa dari pemerintah untuk meningkatkan

pembangunan. Desa dianggap penyokong pendapatan negara terbanyak dengan hasil pertanian, industri rumah tangga maupun tenaga kerja manusianya.

Desa Kanoman merupakan salah satu desa yang merasakan Program Nawacita Presiden Joko Widodo. Pemerintah Desa Kanoman lebih bersemangat dalam memberikan pelayanan publik serta lebih berupaya untuk memajukan Desa Kanoman. Dengan adanya desentralisasi Pemerintah Desa Kanoman dapat mengatur sendiri keperluan desanya, karena Pemerintah Desa Kanoman yang lebih tahu detail keperluan untuk memajukan Desa Kanoman. Apa yang perlu dibangun dan apa yang perlu dikembangkan antara desa satu dengan desa lainnya berbeda, karena secara geografis dan karakteristik setiap desa berbeda.

Pemerintah Desa Kanoman selama ini telah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakatnya. Pemerintah Desa Kanoman telah menerapkan Program Nawacita dengan baik, contoh penerapan Program Nawacita tersebut antara lain melalui pembangunan secara fisik maupun non fisik. Pembangunan secara fisik berupa pembangunan infrastruktur yang seperti perbaikan jalan, corblok, irigasi, pembanguan rumah tidak layak huni, irigasi, drainase, dll. Pembangunan non fisik berupa pemberdayaan masyarakat melalui program pemberian pelatihan keterampilan kepada warga masyarakat khususnya kepada ibu rumah tangga agar dapat membantu meningkatkan penghasilan keluarga, contoh keterampilan tersebut antara lain membuat, pelatihan pemanfaatan tanaman obat, dll.

### **C. Penerapan Progam Membangun Indonesia dari Pinggiran di Desa Kanoman**

Desa Kanoman berada di Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo. Desa Kanoman adalah salah satu desa yang merasakan program dari Presiden Jokowi tentang membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Warga desa Kanoman ingat benar dengan visi-misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla waktu menjelang Pemilihan Umum 2014 itu yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, dengan selogan kerja kerja kerja. Pemerintahan Presiden Joko Widodo berkeyakinan bahwa tanggung jawab untuk membangun bangsa ke depan harus dilakukan dengan cara musyawarah dalam memutuskan dan gotong royong dalam kerja. Kekuatan rakyat adalah Gotong Royong, di mana rakyat secara bahu-membahu menyelesaikan berbagai hambatan dan tantangannya ke depan, mewujudkan ideologi itu bukan kerja orang perorang ataupun kelompok tertentu tetapi secara bersama-sama menjadi satu atas nama kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Membangun desa dari pinggiran menurut Pemerintah Desa Kanoman salah satunya ditunjukkan dengan subsidi dana pemerintah yang mencapai satu milyar disetiap desa melalui dana desa. Dana ini diharapkan pemerintah pusat untuk dapat digunakan desa untuk pembangunan. Desa Kanoman menggunakan dana tersebut untuk pembangunan fisik dan nonfisik. Pembangunan fisik diwujudkan dengan pembangunan jalan sebagai sarana umum, pembangunan dibidang kesehatan yaitu dengan merenovasi gedung Puskesmas Pembantu di Desa Kanoman dan meningkatkan prasarana-sarana yang ada di Puskesmas Pembantu

di Desa Kanoman. Puskesmas yang bersih dan nyaman serta fasilitas lengkap diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pasien dan paramedis di Puskesmas Pembantu di Desa Kanoman lebih bersemangat menangani pasien. Bidang pendidikan Desa Kanoman mendirikan bangunan PAUD dan Perpustakaan Desa di Desa Kanoman. Pembangunan Desa Kanoman juga dialokasikan untuk pembangunan sarana umum seperti renovasi Masjid, gardu atau pos ronda dan gedung serba guna (gedung pertemuan) di Desa Kanoman.

Program nawacita membangun dari daerah pinggiran menurut warga Kanoman sudah diterapkan dengan baik. Desa Kanoman saat ini banyak sekali pembangunan yang digencarkan baik pembangunan fisik maupun non fisik. Pembangunan non fisik berupa peningkatan sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan keterampilan yang diadakan dari Desa Kanoman. Pembangunan yang saat ini digencarkan di Desa Kanoman yaitu dari pembangunan fisik berupa corblok, talud, saluran drainase, pembangunan jalan berupa pengaspalan jalan desa, pembangunan rumah bagi warga yang mempunyai rumah belum layak huni, jambanisasi, irigasi, perkerasan jalan dan lain-lain. Pembangunan non fisik saat ini yang sedang berjalan yaitu posyandu, pelatihan kesehatan (sistem deteksi dini dan tumbuh kembang balita), pelatihan membatik, penyuluhan kesehatan bebas Napza, pembinaan dan pelatihan kesehatan jiwa masyarakat, pembinaan PAUD, Perpustakaan desa dan pembinaan kelompok kebudayaan.

Tingkat keberhasilan Program Nawacita Presiden Joko Widodo tentang membangun Indonesia dari pinggiran di Desa Kanoman dapat dikatakan berhasil,

hal ini dibuktikan dengan banyaknya infrastruktur yang dibangun maupun diperbaiki di desa sehingga mempermudah mobilitas warga, meningkatkan kualitas produk pertanian melalui pembangunan. Upaya Pemerintah Desa Kanoman untuk pemeratakan kesenjangan antara perkotaan dengan pedesaan melalui pemberian pelatihan untuk warga masyarakat seperti pelatihan membuat, pelatihan kesehatan (sistem deteksi dini dan tumbuh kembang balita), pelatihan dan pembinaan kesehatan jiwa masyarakat, pembinaan PAUD, kerukunan umat beragama (guru mengaji, rois, santunan orang cacat), pengolahan data kemiskinan, pelatihan pemanfaatan tanaman obat, selain itu Pemerintah Desa Kanoman membangun infrastruktur yang mempermudah mobilitas untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dana desa yang diberikan pemerintah merupakan salah satu wujud dari penerapan Program Nawacita dan untuk memaksimalkan pembangunan. Desa Kanoman dengan adanya Program Nawacita Presiden Jokowi ini sangat mendukung dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Desa Kanoman.

Melalui pembangunan desa dengan segala potensi yang ada tujuan Presiden Joko Widodo adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Amanah Nawacita di Desa Kanoman terealisasinya sudah sejauh pembangunan fisik dan non fisik. Menurut pemerintah Desa Kanoman Presiden Jokowi mengidentifikasi ada tiga problem pokok bangsa yang dihadapi saat ini, yaitu merosotnya kewibawaan negara, melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, dan merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Oleh sebab itu, tak ada kata lain selain segera melakukan perubahan. Untuk memulai perubahan tersebut, harus dibangun

pondasi awal, pekerjaan untuk memulai agenda perubahan ini adalah pekerjaan yang sulit dan akan banyak menghadapi rintangan serta kritikan. Pembangunan ini dimulai dengan membenahi desa sebagai penyokong daerah perkotaan .

Pembangunan desa harus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional karena sangat terkait dengan upaya membangun Indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah-daerah. Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan penyediaan mandi cuci kakus (MCK) yang memadai kerap menjadi kendala kemajuan desa. Keberadaan jalan menjadi prasyarat untuk menyalurkan hasil bumi ke luar desa dan sebaliknya menyalurkan barang dan jasa bagi kebutuhan warga desa. Hasil bumi yang dihasilkan desa menjadi tak berharga lantaran tak bisa dipasarkan keluar terkendala jalanan yang buruk.

Pemerintah Desa Kanoman selama ini telah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakatnya. Pemerintah Desa Kanoman telah menerapkan Program Nawacita dengan baik, contoh penerapan Program Nawacita tersebut antara lain melalui pembangunan secara fisik maupun non fisik. Pembangunan secara fisik berupa pembangunan infrastruktur yang seperti perbaikan jalan, corblok, irigasi, pembangunan rumah tidak layak huni, irigasi, drainase, dll. Pembangunan non fisik berupa pemberdayaan masyarakat melalui program pemberian pelatihan keterampilan kepada warga masyarakat khususnya kepada ibu rumah tangga agar dapat membantu meningkatkan penghasilan keluarga, contoh keterampilan tersebut antara lain membatik, pelatihan pemanfaatan tanaman obat, pelatihan kesehatan

sistem deteksi dini dan tumbuh kembang balita, pelatihan kesehatan jiwa masyarakat, pelatihan pengolahan data kemiskina, dll.

Masyarakat Desa Kanoman berharap agar Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla dapat memperhatikan kesejahteraan warga masyarakat yang ada di desa Desa Kanoman yang mayoritas bekerja sebagai petani. Warga masyarakat Desa Kanoman berharap agar pemerintah dapat memberikan pelatihan cara bertani yang baik, mensubsidi harga pupuk anorganik, serta menstabilkan harga pertanian, agar saat panen harga tidak murah dan petani tidak rugi. Pemerintah diharapkan mampu untuk mengentaskan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan agar tidak terjadi banyak pengangguran, pemerintah diharapkan untuk dapat meminimalisasikan kesenjangan antara pembangunan didaerah perkotaan dan pedesaan.

Pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur yang buruk menghambat masyarakat desa menikmati pendidikan yang lebih tinggi. Lokasi SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi umumnya berada di kecamatan dan kota kabupaten. Pembangunan Perdesaan Sesuai amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, memang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Caranya adalah dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H. dan Ibnu, M. 2009. *Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Ahmad Bahar. 2014. *9 Alasan Memilih Joko Presiden-Wakil Presiden 2014*. Jakarta: Solusi Publishing.
- Arif Hidayat. 2016. *Konsep Nawacita dalam Pembangunan Nasional*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Azhari Fauzan. 2016. *Menilik Implementasi Pembangunan Daerah Berdasarkan Nawacita dan RPJMN III 2015-2016*. (Online, diunduh 21/08/2017, 20:45).
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewi, Wuryandani, dkk. 2015. *Mewujudkan Agenda Prioritas Nawacita*. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI).
- Djaman Satori dan Aan Komariah. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung Alfabeta.
- Eni Ariyanti. 2014. *Nawacita Ketiga : Pembangunan Nasional Dimulai Dari Desa*. (Online, diunduh 21/01/2017, 20:47).
- Ermaya Suradinata. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Buana Ilmu.
- Humas Kemendagri. 2015. "Membangun Indonesia dari Pinggiran". *Media Praja*, Januari: 10-11. Jakarta.
- Inu Kencana. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. (Online, diunduh 23/04/2017).
- Irawan Sahaja. 2015. *Pengertian Pemerintahan*. (Online, diunduh 24/04/2017).
- Jappy Pellokila. 2014. *Jalan Perubahan Untuk Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian*. Jakarta.

- John W. Creswell. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lexy J. Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Mohammad Amien Rais. 2008. *Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia*. Yogyakarta: PPSK Press.
- Rambe. 2004. *Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rinandi Dinanta. 2014. *Rakyat Meminta Jokowi*. Yogyakarta: EA Books.
- Robert K. Yin. 2003. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- S. Eko Putro Widoyoko. 2012. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- S. Pamudji. 2003. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Saldi Isra. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya Model Legislatif Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soetomo. 2010. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Sudarwan Danim. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Susilo. 2015. *Penerapan Nawacita di Perbatasan Indonesia*. Banjarmasin.

Tim Presiden RI. 2016. *2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK Akselerasi Mewujudkan Indonesia Sentris*. Jakarta: Kantor Staf Presiden Republik Indonesia.

Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Kesejahteraan Sosial.